



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 telah dapat diselesaikan dengan baik, sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab". Penyajian LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk peningkatan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena LKjIP merupakan refleksi dari seluruh rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu LKjIP juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

Bojonegoro, 12 Januari 2024
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUK ALIFAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 200312 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 -2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif serta bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan good governance dan clean governance. LKjIP menjadi alat evaluasi dari pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dengan laporan tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap pengendalian belanja dengan mengaitkan antara keluaran dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur bukan hanya dari penyerapan anggaran saja (output) tetapi juga dari dampak (outcomes) serta benefitnya.

Berpedoman pada hal tersebut di atas, maka yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing.

Misi yang menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab

Tujuan BPKAD adalah Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah dan sasaran yang harus dicapai adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah serta Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja), dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bojonegoro, 12 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUK ALIFAH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691128 200312 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. LANDASAN HUKUM.....	3
D. SISTEMATIKA	3
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI	12
B. REALISASI ANGGARAN	26
C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD	27
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Capaian Kinerja Tahun 2023	8
Tabel 2.2 Target RENSTRA BPKAD	8
Tabel 2.3 Target RENJA BPKAD Tahun 2023	9
Tabel 2.4 Target Penyesuaian RENJA BPKAD Tahun 2023	10
Tabel 2.5 Target Perjanjian KINERJA BPKAD Tahun 2023	10
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja	14
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja	15
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA	15
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	16
Tabel 3.6 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 -2022.....	16
Tabel 3.7 Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 -2022.	16
Tabel 3.8 Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan	17
Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	17
Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	21
Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Anggaran	21
Tabel 3.12 Analisis Program/Kegiatan Penunjang	24
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2023	26
Tabel 3.14 Realisasi Indikator Sasaran RPJMD	27
Tabel 3.15 Tren Perolehan Opini atas LKPD di Jawa Timur Tahun 2013-2022	28
Tabel 3.16 Realisasi Target Kinerja BPKAD Tahun 2022 dan 2023	28
Tabel 3.17 Realisasi Penyesuaian RENJA BPKAD Tahun 2023	29
Tabel 3.18 Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP Semester I Tahun 2023	33
Tabel 3.19 Realisasi Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2023	34
Tabel 3.20 Capaian MCP KPK Tahun 2023	35
Tabel 3.21 Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2023	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat dibutuhkan untuk mengukur kinerja dan kualitas kerja suatu instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku SKPD setelah tahun anggaran berakhir mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro kinerjanya diukur berdasarkan kontribusi yang dihasilkan dalam menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah tertuang dalam Rancangan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 yaitu Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah .

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun-tahun mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah media pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja. Dalam Laporan

Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan guna menyesuaikan dengan perkembangan yang begitu cepat. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global memiliki andil dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro harus dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelemahan (***Weakness***) dan memanfaatkan kekuatan (***Strenght***) dari faktor internal yang ada untuk dapatnya memanfaatkan peluang (***Opportunity***) dan dapat mengatasi ancaman (***Threat***) yang mungkin terjadi. Dengan demikian posisi dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mengambil peran sesuai dengan hasil analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro memperhatikan berbagai peraturan perundang – undangan antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peyunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

Daftar tabel

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi Pegawai dan Sarana prasarana

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian skala pengukuran capaian kinerja dan Analisis kinerja atas capaian, Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2023 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah SKPD yang mempunyai tugas mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah, dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;

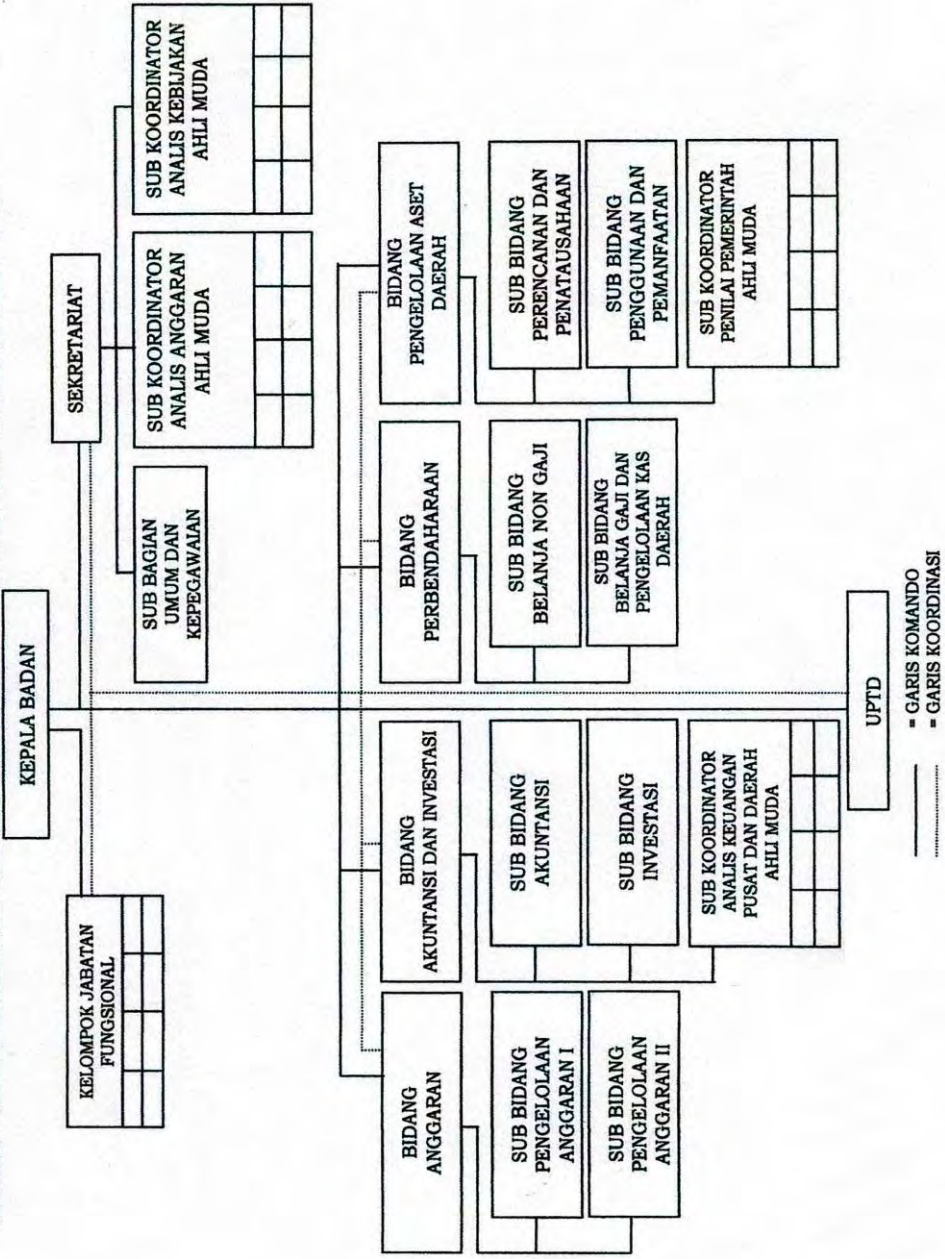
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan aset Daerah;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan dimaksud terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Koordinator Analis Anggaran Ahli Muda; dan
 - 3. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda.
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1. Sub Pengelolaan Anggaran I; dan
 - 2. Sub Pengelolaan Anggaran II;
- d. Bidang Akuntansi dan Investasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Investasi; dan
 - 3. Sub Koordinator Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
 - 2. Sub Bidang Belanja Gaji dan Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan; dan
 - 3. Sub Koordinator Penilai Pemerintah Ahli Muda.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsioanal

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana disajikan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



- GARIS KOMANDO
- GARIS KOORDINASI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia beserta seluruh sumber daya lainnya guna menjawab tuntutan pekerjaan serta perubahan perkembangan lingkungan strategis di semua tataran.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dari visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kinerja berdasarkan Rencana Strategis yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- **VISI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 Visi Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

“ Menjadikan Bojonegoro sumber ekonomi kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing “

- **MISI**

Misi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 -2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan.

4. Mewujudkan rasa aman dan keperpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa.
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

Dalam rangka untuk keberhasilan pencapaian visi misi tersebut di atas, perlu ditetapkan tujuan dan beberapa sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lainnya saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset milik daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Adapun Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP

Tabel 2.2
Target RENSTRA BPKAD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas	Persentase OPD yang	90%	95%	100%	100%	100%

		pengelolaan keuangan daerah	menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan					
			Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	75%	75%	80%	80%	90%
			Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	75%	75%	80%	80%	90%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	60%	60%	60%	60%	75%
			Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	90%	95%	100%	100%	100%
			Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti	45%	45%	50%	50%	60%

Tabel 2.3
Target RENJA BPKAD TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah		Opini BPK	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
			Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	90%
			Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	90%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	75%

			Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
			Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milim Daerah yang ditindaklanjuti	60%

Tabel 2.4

Target Penyesuaian RENJA BPKAD TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah		Opini BPK	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
			Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	100%
			Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	90%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3%
			Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	95%
			Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milim Daerah yang ditindaklanjuti	60%

Tabel 2.5

Target PERJANJIAN KINERJA BPKAD TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bojonegoro	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Predikat SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Baik

		Prosentase Penyerapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85%
		Nilai MCP KPK	95%
		Inovasi	1 Inovasi/Penghargaan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Utama dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*).

Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan 4 (empat) skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

Bilamana Indikator Kinerja Utama mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Tinggi
4	76% sampai 90%	Tinggi
3	66% sampai 75%	Sedang
2	51% sampai 65%	Rendah
1	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

Sebaliknya bilamana Indikator Kinerja Utama mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Rendah
4	76% sampai 90%	Rendah
3	66% sampai 75%	Sedang

2	51% sampai 65%	Tinggi
1	Kurang dari 50%	Sangat Tinggi

Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 menggunakan metode sebagaimana yang diatur dalam Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 disajikan melalui beberapa metode sebagaimana berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mewujudkan misi kedua RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 -2023 yaitu “ **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB** “ Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah

b. Sasaran

1. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

c. Indikator

Indikator untuk sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah :

- Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan
- Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP
- Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti

Indikator untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah :

- Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah
- Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan
- Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja, maka pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi target yang ditetapkan untuk mencapai sasaran adalah realisasi dari indikator kinerja yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten Bojonegoro disajikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 tercapai 100% (seratus persen) yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Karena capaian target adalah 100% maka kategori capaian Sangat Tinggi

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dalam Pencapaian Indikator kinerja yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK. Pada Tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Opini WTP sebanyak 9 (sembilan) kali secara berturut-turut mulai Tahun 2014.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Th. n-2	Th. n-1	Th. n
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

3. Realisasi kinerja dengan mendapatkan opini WTP dalam pemeriksaan LKPD Kabupaten Bojonegoro adalah sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMD dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi s/d Th. n	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional sesuai dengan sasaran strategis meningkatnya kinerja pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan adalah dengan mendapatkan opini WTP oleh BPK dalam Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Pada Tahun 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut dari hasil pemeriksaan atas 82 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang menunjukkan opini WTP atas 81 (delapan puluh satu) LKKL dan LKBUN. Satu LKKL yaitu Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memenuhi target dengan mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	-

Tabel 3.6
Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 -2022

Opini	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	82	85	85	84	82
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	4	2	2	4	1
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	1	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	88	87	88	83

Tabel 3.7
Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 -2022



5. Analisis penyebab keberhasilan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam mempertahankan opini WTP oleh BPK atas LKPD adalah dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- sistem pengendalian internal yang memadai;
- meminimalisir salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan;
- laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Tabel 3.8
Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan

NO	Sasaran Strategis	Tercapai/ Tidak	Penyebab	Solusi Perbaikan atau peningkatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Tercapai Opini WTP	sistem pengendalian internal memadai, tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan dan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP	Meningkatkan sistem pengendalian internal, meminimalisir salah saji atas pos-pos laporan keuangan dan menyajikannya sesuai SAP serta segera menindaklanjuti hasil LHP BPK

6. Pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro terutama dalam melaksanakan belanja daerah dilakukan dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Dalam hal ini target program dan kegiatan tetap tercapai 100% tetapi anggaran yang digunakan diminimalisir seefisien mungkin, pada tahun 2023 di BPKAD Pagu Anggaran seluruhnya sebesar Rp. 1.605.202.109.326,00 (satu triliun enam ratus lima milyar dua ratus dua juga seratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) terserap sebesar 79,08% (tujuh puluh sembilan koma nol delapan persen) yaitu sebesar Rp. 1.304.987.722.036,00 (satu triliun tiga ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) 126,45%.

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan	100	100	100			

	keuangan daerah	keuangan sesuai ketentuan Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	80 80	100 85	125 106			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	100	100	1.639.927.033.421,00	1.296.494.117.291,00	76,06
		Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100	100	100			
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100	100	100			
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	1.602.315.500,00	1.359.680.642,00	84,86%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	100	100	1.018.871.208,00	911.385.591,00	89,45
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan Rencana	100	100	100	720.406.000,00	572.366.972,00	79,45

		Anggaran Kas						
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	100	100	1.635.792.020.213,00	1.292.925.701.218,00	79,04
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	persentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	100	100	793.420.500,00	724.982.868,00	91,37
2	Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milim Daerah yang ditindaklanjuti	60 100 50	70 100 55	116 100 110			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	1.654.577.915,00	1.451.135.417,00	87,70
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	100	100	1.654.577.915,00	1.451.135.417,00	87,70
3	Sasaran Meningkatnya kinerja pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik			
		Nilai SAKIP	BB	BB	BB			

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	100	100	8.620.497.990,00	7.042.469.328,00	81,69
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	100	434.836.895,00	421.115.971,00	96,84
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	100	100	100	6.741.148.209,00	5.380.190.898,00	79,81
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	100	100	100	107.314.000,00	103.582.000,00	96,52
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	100	100	100	443.114.350,00	428.991.687,00	96,81
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	100	100	100	464.765.786,00	315.208.472,00	67,82
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	429.318.750,00	393.380.300,00	91,63
Jumlah Total						1.650.202.109.326,00	1.304.987.722.036,00	79,08

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	% serapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan	Opini BPK	100%	79,08%	126,45%

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	% Capaian	% Serapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	100		
		Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	100		
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	100		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	100	76,06	126,49
		Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari	100		
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	84,86%	117,84
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	100	89,45	111,79
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat waktu	100	79,45	125,86

	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100	79,04	126,52
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100	91,37	109,44
2	Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milim Daerah yang ditindaklanjuti Persentase barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 100 100		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	87,70	114,02
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100	87,70	114,02
3	Sasaran Meningkatnya kinerja pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik		
		Nilai SAKIP	BB		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100	81,69	122,41
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	96,84	103,26
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	100	79,81	125,30
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	100	96,52	103,60
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	100	96,81	103,19

	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	100	67,82	147,45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	91,63	109,14

Rata-rata capaian efisiensi pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 adalah sebesar 126,45% untuk penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Efisiensi atau daya guna berhubungan erat dengan produktivitas, yaitu pengukuran dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan operasional disebut efisien bila:

- Suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan input serendah-rendahnya (*spending well*).
- Adanya penurunan atau penghapusan biaya yang tidak perlu (*cost reduction*).

Analisis efisiensi dilakukan per sasaran strategis. Penyimpulan efisiensi adalah sebagai berikut:

- Efisien jika rasio efisiensi sama atau lebih besar dari 100%.
- Belum efisien jika rasio efisiensi lebih kecil dari 100%.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Rasio efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio efisiensi anggaran} = \frac{\left[\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \right]}{\left[\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \right]} \times 100\%$$

Berdasarkan dari rumus perhitungan efisiensi diatas maka pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro masuk dalam kategori efisien karena rasio efisiensi lebih dari 100% yaitu 126,45% untuk total penggunaan dana dari pagu anggaran yang ada. Efisiensi tertinggi berada pada kegiatan Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan (Rasio 147,45%) , diikuti kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Rasio 126,52 %) serta Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Rasio 125,86%)

7. Analisis program/kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :
1. Dengan tercukupinya kebutuhan pelayanan umum, kepegawaian serta sarana dan prasarana kantor.
 2. Penganggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan rekening yang tepat sesuai ketentuan dan penetapan APBD tepat waktu.
 3. Menyusun laporan keuangan sesuai prinsip kebijakan akuntansi pemerintah daerah sehingga untuk memperoleh predikat WTP dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK.
 4. Mencukupi anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan manajemen kas yang efektif.
 5. Terlaksananya tertib pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan penghapusan aset daerah

Tabel 3.12
Analisis Program/Kegiatan Penunjang

No	Sasaran/Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Analisa
1	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.639.927.033.421,00	Merupakan penunjang untuk tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan perencanaan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, serta sarana dan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan
	Persentase penerbitan SP2D dalam 2 hari			
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu			
	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.602.315.500,00	
	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.018.871.208,00	

	Persentase OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Kas	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	720.406.000,00	dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.635.792.020.213,00	
	prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	793.420.500,00	
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.654.577.915,00	
	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.654.577.915,00	
	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.620.497.990,00	
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.836.895,00	
	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	6.741.148.209,00	
	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	107.314.000,00	
	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	443.114.350,00	

	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	464.765.786,00	
	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.318.750,00	

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dari pagu Rp. 1.605.202.109.326,00 (satu triliun enam ratus lima milyar dua ratus dua juga seratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) terserap sebesar 79,08% (tujuh puluh sembilan koma nol delapan persen) yaitu sebesar Rp. 1.304.987.722.036,00 (satu triliun tiga ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah).

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.639.927.033.421,00	1.296.494.117.291,00
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.602.315.500,00	1.359.680.642,00
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.018.871.208,00	911.385.591,00
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	720.406.000,00	572.366.972,00
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.635.792.020.213,00	1.292.925.701.218,00
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	793.420.500,00	724.982.868,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.654.577.915,00	1.451.135.417,00
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.654.577.915,00	1.451.135.417,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.620.497.990,00	7.042.469.328,00
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.836.895,00	421.115.971,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	6.741.148.209,00	5.380.190.898,00

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	107.314.000,00	103.582.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	443.114.350,00	428.991.687,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	464.765.786,00	315.208.472,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.318.750,00	393.380.300,00
	JUMLAH	1.650.202.109.326,00	1.304.987.036,00

C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

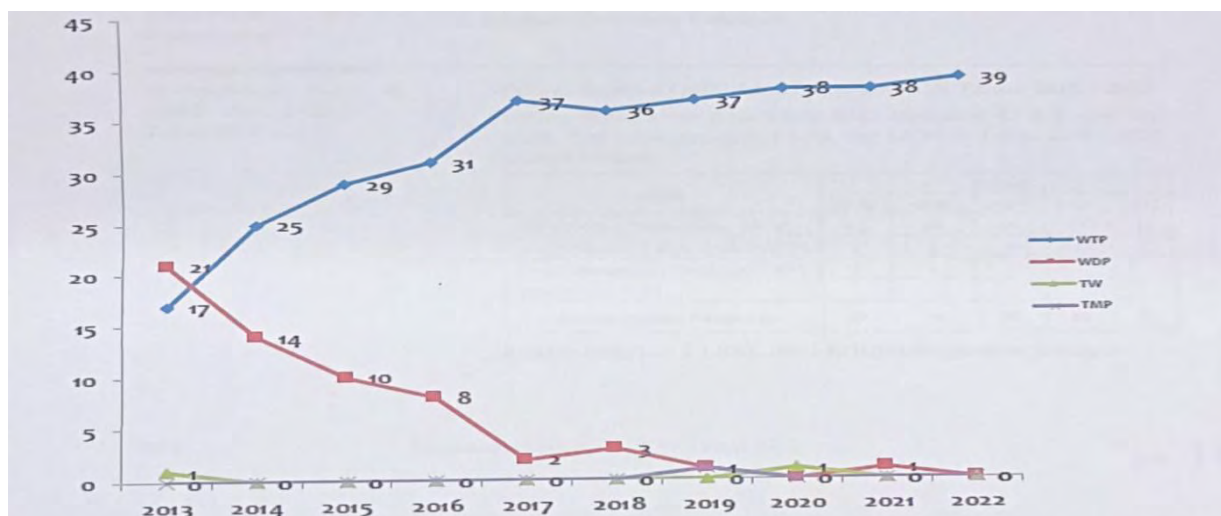
Untuk target RPJMD Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam menjalankan misi kedua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab juga telah dapat tercapai yaitu dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan merupakan kesembilan kalinya secara berturut-turut. Katagori WTP merupakan pemberian opini tertinggi oleh BPK-RI dalam rangka pencapaian laporan keuangan yang memadai sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tabel 3.14
Realisasi Indikator Sasaran RPJMD

NO	VISI DAN MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	<p>VISI</p> <p>Menjadikan Bojonegoro sumber ekonomi kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing</p> <p>MISI</p> <p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab</p>	<p>TUJUAN</p> <p>Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab</p> <p>SASARAN</p> <p>Meningkatnya kinerja pemerintahan</p>	Opini BPK	WTP	WTP

Jika dibandingkan dengan Perkembangan Opini BPK atas LKPD 2013-2022 di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel berikut maka pencapaian Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD:

Tabel 3.15
Tren Perolehan Opini atas LKPD di Jawa Timur Tahun 2013-2022



Tabel 3.16
Realisasi Target Kinerja BPKAD Tahun 2022 dan 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penyampaian laporan keuangan ke BPK tepat waktu	100%	100%	100%	100%
			Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	80%	100%	90%	100%
			Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	90%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	60%	70%	75%	75%
			Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%

			Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti	50%	60%	60%	60%
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----

Tabel 3.17

Realisasi Penyesuaian RENJA BPKAD TAHUN 2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%
		Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	100%	100%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	90%	90%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3%	3%
		Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	95%	100%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milim Daerah yang ditindaklanjuti	60%	60%

Pencapaian realisasi target kinerja serta penyesuaiannya hasil dari evaluasi Inspektorat dalam Rencana Strategis yang dijabarkan pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Indikator Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan ditargetkan 100% terealisasi sebesar 100% karena

dari 74 OPD yang ada telah menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta didukung data sesuai yang dipersyaratkan bagi OPD yaitu :

- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan operasional;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
2. Untuk Indikator Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP dari target sebesar 90% OPD terealisasi sebesar 100%.
 3. Indikator Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dari target 90% tercapai 90% sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk temuan tahun 2023 pada dasarnya telah ditindaklanjuti seluruhnya namun masih ada beberapa tindaklanjut yang belum sesuai rekomendasi BPK serta masih terdapat beberapa temuan tahun-tahun yang belum tuntas penyesuaiannya.

Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sebagai berikut :

1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah ditargetkan sebesar 75% dari semua OPD dan terealisasi sebesar 75%. Walaupun telah mengalami peningkatan dalam tata kelola barang milik daerah pada OPD, namun belum bisa optimal karena masih terdapat permasalahan antara lain karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai.
2. Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan dari target 100% tercapai 100%, dimana setiap OPD telah menyusun laporan barangnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengharuskan setiap Pengguna Barang untuk menyusun laporan semesteran dan tahunan sebagai dasar untuk menyusun laporan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah yang menjadi bagian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi secara tuntas dari target 60% tercapai 60%. Meskipun seluruh temuan telah ditindaklanjuti sama serta capaian kinerja telah

sesuai target tetapi masih banyak temuan terkait pengelolaan barang milik daerah yang belum tuntas atau belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selain itu juga masih adanya tunggakan penyesuaian tindak lanjut temuan dengan rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga nilai belum maksimal seperti yang diharapkan.

4. Untuk indikator baru hasil penyesuaian dari rekomendasi Inspektorat yaitu Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari target sebesar 3% tercapai 3%.

Hal-hal yang menjadi faktor pendorong sehingga target kinerja yang ditetapkan baik dari sisi pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat tercapai dan telampaui adalah :

1. Dilaksanakannya rekonsiliasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan ;
2. Dilaksanakannya pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan SKPD dapat tersusun sesuai ketentuan sebelum batas akhir penyampaian laporan ke BPK;
3. Untuk meminimalisir temuan BPK dalam pengelolaan aset /barang milik daerah maka dilaksanakan sensus barang dan rekonsiliasi barang milik daerah disetiap OPD;
4. Untuk Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dilaksanakan Bimbingan Teknis dan sosialisasi jika ada peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
5. Agar tetap mendapatkan opini WTP setiap SKPD yang mendapatkan temuan sementara sesegera mungkin untuk menindaklanjuti temuan tersebut baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah.

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah belum tercapai secara optimal adalah :

1. Untuk penyelesaian temuan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dituntaskan karena kurang adanya bukti pendukung dan data yang memadai;
2. Untuk penyelesaian permasalahan aset/barang milik daerah membutuhkan waktu yang lama dan banyak pihak yang terkait;

3. Adanya kapasitas dan jumlah SDM yang berbeda di masing-masing OPD sehingga mempengaruhi ketepatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Adanya aset yang perlu ditinjau ulang keberadaannya, belum tercatat dan belum didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai;

Langkah tindaklanjut atau perbaikan yang dapat dilaksanakan agar pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih baik adalah :

1. Percepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan barang milik daerah dari SKPD;
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi;
3. Segera menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan didukung data yang lengkap;
4. Melaksanakan sertifikasi tanah milik pemerintah kabupaten, inventarisasi barang dan sensus barang serta rekonsiliasi dan validasi barang;
5. Membuat pakta integritas penggunaan barang milik daerah;

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK antara lain adalah terdapat beberapa temuan administrasi tahun lampau, yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dikarenakan rekomendasi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi maupun regulasi saat ini.

Perbandingan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Semester I adalah :

1. Pemerintah Pusat :

Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 6.330 (28,7%) dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 (0,1%)

2. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

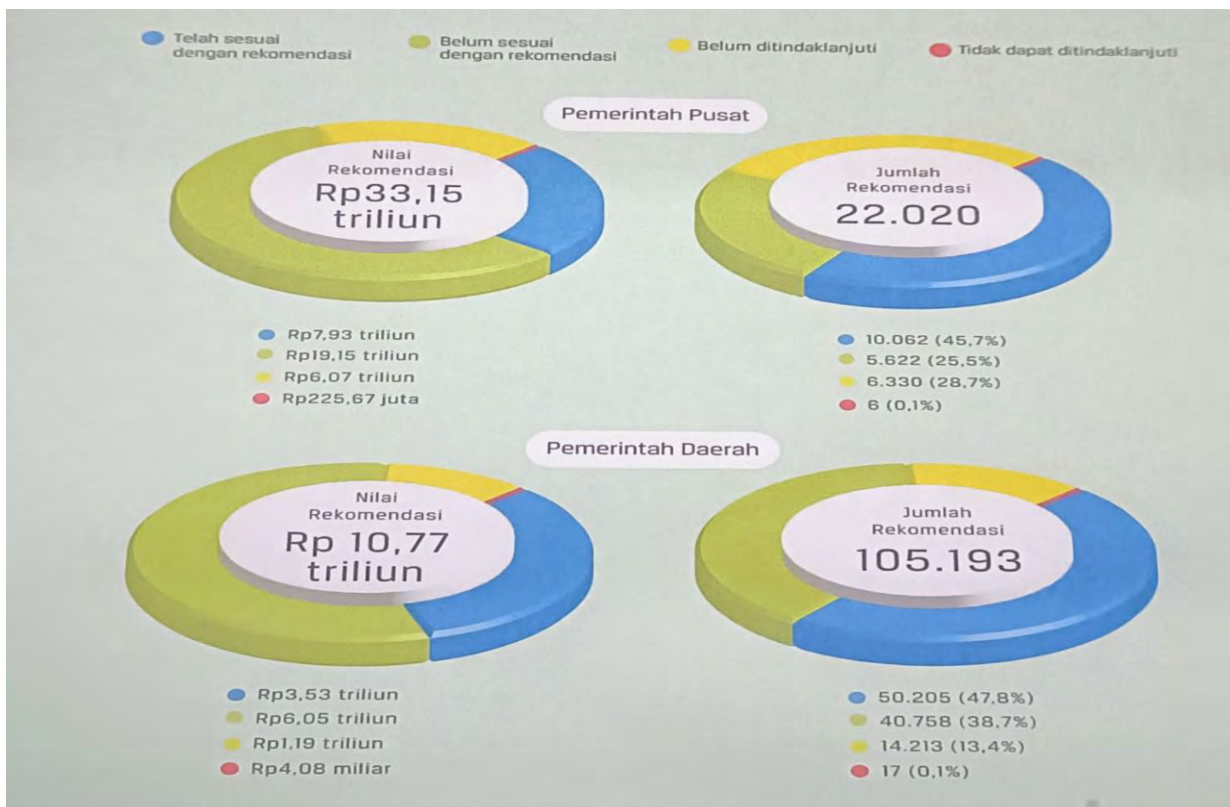
Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 14.213 (13,4%) dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 17 (0,1%)

3. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Laporan Hasil Pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi BPK untuk pengelolaan keuangan daerah sebanyak 10% dan sedangkan untuk pengelolaan aset daerah sebesar 40% sehingga rata-rata yang tindaklanju belum sesuai untuk temuan Kabupaten Bojonegoro adalah 25%. Rekomendasi Kabupaten Bojonegoro sebanyak 28 ditindaklanjuti 28, sesuai rekomendasi 21 (75%) belum sesuai rekomendasi 7 (25%) tidak dapat ditindaklanjuti 0.

Angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tingkat tindaklanjut dari pemerintah pusat namun lebih tinggi dari rata-rata tindaklanjut temuan pemerintah daerah.

Tabel 3.18
Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP Semester I Tahun 2023



Tabel 3.19

REALISASI PERJANJIAN KINERJA BPKAD TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bojonegoro	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Predikat SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sangat Baik	Sangat Baik
		Prosentase Penyerapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85%	79,08%
		Nilai MCP KPK	97%	98%
		Inovasi	1 Inovasi/Penghargaan	1 Inovasi/Penghargaan

Pencapaian realisasi target Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro beberapa indikator telah sesuai target yaitu :

1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bojonegoro mendapatkan WTP sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dari BPK Provinsi Jawa Timur Tanggal 22 Mei 2023;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai 89,07 (sangat baik) dari responden eksternal dan 92,03 (sangat baik) dari responden internal untuk Layanan Penerbitan SP2D sebagaimana Laporan Akhir Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

- Total Nilai Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Pada Akhir Tahun 2023 sebesar 98

Tabel 3.20
Capaian MCP KPK Tahun 2023



- Untuk Capaian Target Penyerapan Anggaran ditargetkan sebesar 85% dalam pelaksanaannya tidak tercapai target hanya terealisasi sebesar 79,08%. Tidak optimalnya realisasi penyerapan anggaran karena penyaluran Bantuan Keuangan Khusus yang tidak maksimal. Dimana calon penerima bantuan tidak mengajukan penyerapan anggaran dengan pertimbangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi. Karena bentuk bantuan mayoritas berupa kegiatan fisik. Secara Rinci Penyerapan Anggaran dapat dilihat dalam tabel Laporan Realisasi Anggaran di bawah ini :

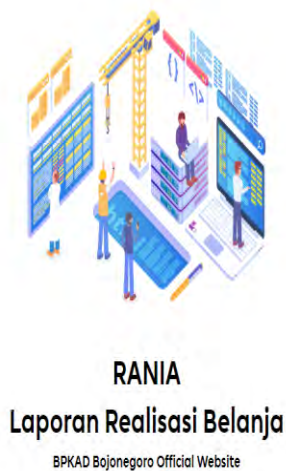
Tabel 3.21
Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2023

PEMERINTAHAN KAB. BOJONEGORO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	2023%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.622.146.187.058,00	5.169.470.027.219,51	111,84	5.199.701.243.595,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	309.855.750.000,00	297.149.332.597,50	270,49	236.421.532.288,18
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	382.400.499.520,88	0,00	137.641.553.852,52
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	309.855.750.000,00	114.746.833.076,62	104,45	98.779.978.435,66
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	309.855.750.000,00	297.149.332.597,50	270,49	236.421.532.288,18
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.334.861.414.632,00	4.802.328.430.318,00	108,29	4.896.427.553.388,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.864.902.869.811,00	4.214.812.801.908,00	109,05	4.326.959.404.057,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.567.342.020.811,00	3.110.228.401.528,00	121,15	3.090.429.744.876,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	500.580.322.000,00	710.946.273.502,00	81,16	961.028.899.802,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.257.391.000,00	31.486.932.421,00	91,91	38.098.520.712,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	362.723.136.000,00	342.171.194.457,00	94,33	337.402.239.167,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	3.864.902.869.811,00	4.214.832.801.908,00	109,05	4.326.959.404.057,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	14.636.752.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	407.133.690.000,00	376.422.736.600,00	92,46	358.753.665.827,00
4.2.01.06	Insentif Fisik	11.524.031.000,00	11.524.031.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	418.657.721.000,00	387.946.767.600,00	92,66	373.390.417.827,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.130.023.821,00	299.548.860.810,00	131,89	196.077.731.504,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	137.867.804.000,00	388.120.725.100,00	136,45	182.848.759.504,00
4.2.02.03	Bantuan Keuangan	15.433.019.821,00	11.428.135.710,00	85,07	13.228.972.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	15.130.023.821,00	399.548.860.810,00	131,89	196.077.731.504,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	4.334.861.414.632,00	4.802.328.430.318,00	108,29	4.896.427.553.388,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.429.022.426,00	69.992.264.304,00	90,40	66.852.157.919,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	77.429.022.426,00	69.992.264.304,00	90,40	66.852.157.919,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	2023%	REALISASI 2022
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.429.022.426,00	69.992.264.304,00	90,40	66.852.157.919,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.622.146.187.058,00	5.169.470.027.219,51	111,84	5.199.701.243.595,18
5	BELANJA DAERAH	1.650.202.109.326,00	1.304.987.722.036,20	79,08	1.396.782.103.592,41
5.1	BELANJA OPERASI	14.552.358.905,00	12.135.260.001,00	83,39	13.640.768.411,80
5.1.01	Belanja Pegawai	6.717.004.899,00	5.357.343.053,00	79,76	5.680.429.271,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.835.354.006,00	6.777.916.948,00	86,50	7.687.893.530,80
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	272.455.610,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.552.358.905,00	12.135.260.001,00	83,39	13.640.768.411,80
5.2	BELANJA MODAL	512.864.378,00	500.350.012,00	97,56	418.267.740,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	485.114.378,00	473.100.012,00	97,52	418.267.740,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.750.000,00	27.250.000,00	98,20	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	512.864.378,00	500.350.012,00	97,56	418.267.740,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	85.993.420.313,00	37.321.031.053,00	56,55	34.072.835.218,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	85.993.420.313,00	37.321.031.053,00	56,55	34.072.835.218,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	85.993.420.313,00	37.321.031.053,00	56,55	34.072.835.218,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.569.143.465.730,00	1.255.031.080.870,20	79,98	1.348.650.232.222,61
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	17.554.281.693,00	17.391.878.164,00	99,07	15.575.048.940,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.512.919.143.698,00	1.213.125.484.555,20	80,12	1.291.395.190.159,61
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.569.143.465.730,00	1.255.031.080.870,20	79,98	1.348.650.232.222,61
	JUMLAH BELANJA	1.650.202.109.326,00	1.304.987.722.036,20	79,08	1.396.782.103.592,41
	SURPLUS/DEFISIT	2.971.944.077.732,00	3.864.482.305.183,31	130,03	3.802.919.140.002,77
6	PEMBIAYAAN DAERAH	2.617.798.808.333,00	3.218.321.058.745,70	122,94	2.828.546.727.244,83
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.217.798.808.333,00	3.218.321.058.745,70	100,02	2.828.546.727.244,83
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.217.798.808.333,00	3.217.798.808.333,55	100,00	2.827.697.408.098,37
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	522.250.412,15	0,00	849.318.546,46
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.217.798.808.333,00	3.218.321.058.745,70	100,02	2.828.546.727.244,83
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	2023%	REALISASI 2022
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.617.798.808.333,00	3.218.321.058.745,70	122,94	2.828.546.727.244,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.589.742.886.066,00	7.082.803.363.929,01	126,71	6.631.465.867.247,60

5. Pada Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengembangkan aplikasi RANIA yang dibuat pada Tahun 2023 pada awalnya aplikasi tersebut untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang mengakomodir Laporan Realisasi Anggaran secara realtime. Pada Tahun 2023 Aplikasi tersebut dikembangkan untuk mendukung aplikasi SIPD terutama untuk informasi progress dari proses SP2D bagi Bendahara Pengeluaran SKPD.



Login

Username

admin

Password

.....

p d e h

pdeh

Login

Histori

No. Reg : 000001

Di Input oleh **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** pada 25-05-2023 18:52

Dikirim oleh **ADI** pada 25-05-2023 19:32

Diterima di BPKAD oleh **Administrator** pada 25-05-2023 19:52

Divalidasi oleh **Administrator** pada 25-05-2023 20:02

Dicetak oleh **Administrator** pada 25-05-2023 20:15

Diproses Bank oleh **Administrator** pada 25-05-2023 20:20

6. Untuk target Predikat SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai A belum dapat tercapai, BPKAD mendapatkan nilai BB. Selanjutnya untuk dapat mencapai target akan terus dilaksanakan perbaikan dalam mencukupi indikator penilaian SAKIP.

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian evaluasi kinerja, permasalahan dan solusi selama tahun 2023, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah (SKPD) dan pelaksanaan tugas fungsional selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Bendahara Umum Daerah (BUD) telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun masih perlu untuk ditingkatkan.

Sebagai kesimpulan ada beberapa catatan penting yang mempengaruhi belum optimalnya penyerapan anggaran tahun 2023 antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran dalam beberapa kegiatan ;
2. Penerima Bantuan Keuangan tidak melakukan penyerapan anggaran karena pertimbangan waktu pelaksanaan;

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Melakukan koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder (antar SKPD maupun dengan instansi vertikal)
4. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja, akan dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Lebih intensif dalam melaksanakan verifikasi dan pendampingan kepada pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan serta barang milik daerah;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi yang efektif antar pegawai, antar bidang dan antar perangkat daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pada masing-masing bidang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, 12 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



LULUH ALIFAH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691128 200312 2 008

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LULUK ALIFAH, SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANNA MU'AWANAH**

Jabatan : Bupati Bojonegoro

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bojonegoro, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

BUPATI BOJONEGORO

ANNA MU'AWANAH

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

LULUK ALIFAH, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19691128 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;	Persentase OPD menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
		Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	90%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	90%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	75%
		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti	60%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7,577,588,721	
2.	Pengelolaan keuangan daerah;	1,132,334,724,512	
3.	Pengelolaan barang milik daerah	1,678,577,915	
JUMLAH		1,141,590,891,148	

Bojonegoro, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BOJONEGORO


ANNA MU'AWANAH

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**


LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Bojonegoro	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		2. Predikat SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A (85)
		3. Indeks kepuasan masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,9 dari skala 4
		4. Persentase penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85 %
		5. MCP	97 %
		6. Inovasi	1 Inovasi/ Penghargaan
		7. Presentase Peningkatan Realisasi PAD	80%
		8. Jumlah nominal PAD	Rp.109.855.750.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,577,588,721	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227,671,802	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,531,838	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,242,688	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,668,953	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,441,638	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,714,765	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97,723,690	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97,348,230	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,470,899,008	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,736,520,698	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	710,504,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,323,590	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,651,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,701,000	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,984,300	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11,651,950	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,562,470	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93,579,000	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	93,579,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221,421,976	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,344,360	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154,510,016	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,346,100	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,961,500	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,130,000	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28,130,000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254,550,285	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26,346,585	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,945,600	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187,258,100	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309,466,650	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251,778,750	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,687,500	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,400	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1,132,334,724,512	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,602,315,500	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	45,350,100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	40,199,900	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	40,390,400	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	32,979,500	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5,700,400	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5,700,400	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	259,216,000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	264,431,600	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	850,394,100	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1,838,550	
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2,160,000	
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1,914,000	
13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52,040,550	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	843,959,208	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	119,390,450	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	121,778,050	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105,884,740	
4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	270,926,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	90,983,960	
6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	134,996,008	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	720,406,000	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	125,743,000	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38,118,000	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	48,583,400	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12,210,900	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	169,419,000	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12,179,400	
7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	155,286,900	
8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12,943,000	
9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	34,764,700	
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34,124,700	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	39,052,000	
12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	12,515,000	
13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	25,466,000	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,128,374,623,304	
1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	363,706,070	
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1,022,216,709,774	
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	82,611,042,774	
4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	23,183,164,686	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	793,420,500	
1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	237,300,000	
2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	310,478,500	
3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	245,642,000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,678,577,915	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,678,577,915	
1	Penyusunan Standar Harga	24,061,000	
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	91,416,600	
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83,250,000	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	279,157,885	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	47,500,000	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	594,290,000	
7	Penilaian Barang Milik Daerah	166,060,000	
8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	23,750,000	
9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	232,783,480	
10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	65,834,200	
11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16,474,750	
12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	54,000,000	
	JUMLAH	1,141,590,891,148	

Bojonegoro, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BOJONEGORO


ANNA MU'AWANAH

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**


LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 200312 2 008



PERJANJIAN KINERJA P-APBD TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Alifah
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Adriyanto
Jabatan : Pj. Bupati Bojonegoro

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bojonegoro, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Pj. Bupati Bojonegoro

Adriyanto

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Luluk Alifah
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA P-APBD TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;	Persentase OPD menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
		Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	100%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	90%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Presentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3%
		Presentase Pengamanan Barang Milik Daerah	95%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti	60%
3.	Meningkatnya kualitas layanan perbendaharaan	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%
		IKM Internal	92
		IKM eksternal	89

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan keuangan daerah;	1.639.927.033.421	
2.	Pengelolaan barang milik daerah	1.654.577.915	
JUMLAH		1.641.581.611.336	

Bojonegoro, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Pj. Bupati Bojonegoro



Adriyanto

Pihak Pertama,

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah



Luluk Alifah

Pembina Tingkat I

NIP. 19691128 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA P-APBD TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;	Persentase OPD menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
		Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP	100%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	90%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3%
		Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	95%
		Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti	60%
3.	Meningkatnya kualitas layanan perbendaharaan	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%
		IKM Internal	92
		IKM eksternal	89

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.620.497.990	
2.	Pengelolaan keuangan daerah;	1.639.927.033.421	
3.	Pengelolaan barang milik daerah	1.654.577.915	
JUMLAH		1.650.202.109.326	

Bojonegoro, 1 November 2023

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Bojonegoro


Adriyanto

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Luluk Alifah
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 200312 2 008

PERJANJIAN KINERJA P-APBD TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Bojonegoro	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		2. Predikat SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A (85)
		3. Indeks kepuasan masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,9 dari skala 4
		4. Persentase penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	85 %
		5. MCP	97 %
		6. Inovasi	1 Inovasi/ Penghargaan
		7. Presentase Realisasi PAD	80%
		8. Jumlah nominal PAD	Rp.109.855.750.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.620.497.990	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.836.895	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.372.838	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.977.688	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.403.953	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.441.638	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.468.858	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	296.702.690	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.469.230	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.741.148.209	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.007.034.899	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	710.504.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.323.590	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.651.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.701.000	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.984.300	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.651.950	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.297.470	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.314.000	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	107.314.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.114.350	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.320.110	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.927.005	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	208.303.735	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.961.500	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.070.000	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.532.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.765.786	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.475.775	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.724.843	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.565.168	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.318.750	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.441.250	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.877.500	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.000.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.639.927.033.421	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.602.315.500	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	45.156.100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	45.185.900	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	18.990.400	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	32.994.500	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5.700.400	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.700.400	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	302.182.000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	297.858.600	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	793.294.100	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1.838.550	
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.160.000	
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1.914.000	
13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	49.340.550	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.018.871.208	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	154.231.450	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	138.854.050	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	114.526.740	
4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	310.838.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	122.374.960	
6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	178.046.008	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	720.406.000	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	125.743.000	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	38.118.000	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	48.583.400	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12.210.900	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	169.419.000	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12.179.400	
7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	155.286.900	
8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12.943.000	
9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	34.764.700	
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.124.700	
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	39.052.000	
12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	12.515.000	
13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	25.466.000	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.635.792.020.213	
1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	363.706.070	
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.543.038.071.798	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	65.993.420.313	
4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	26.396.822.032	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	793.420.500	
1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	237.300.000	
2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	310.478.500	
3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	245.642.000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.654.577.915	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.654.577.915	
1	Penyusunan Standar Harga	15.561.000	
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	93.594.600	
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	48.603.500	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	372.961.885	
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	47.500.000	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	476.690.000	
7	Penilaian Barang Milik Daerah	179.308.000	
8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	23.750.000	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	238.301.980	
10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	85.832.200	
11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.474.750	
12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	56.000.000	
	JUMLAH	1.650.202.109.326	

Bojonegoro, 1 November 2023

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Bojonegoro



Adriyanto

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah



Luluk Alifah
Pembina Tingkat I
NIP. 19691128 200312 2 008

PIAGAM PRESTASI







